



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA



# LAPORAN KINERJA

## TRIWULAN III

tahun 2024



Disusun Oleh :

## Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesainya Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Batam yang merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk menerangkan tingkat pencapaian sasaran atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja Triwulan III Tahun 2024 merupakan perkembangan capaian kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Pangkalan PSDKP Batam melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan serta melakukan perbaikan sistem dan strategi melalui koordinasi secara terus menerus dengan berbagai pihak untuk perbaikan kinerja selanjutnya.

Dengan adanya Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja dan permasalahan di Pangkalan Pengawasan SDKP Batam dalam melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta diharapkan dapat membuka pemikiran lebih kreatif dari berbagai pihak tentang bagaimana meningkatkan peran dan kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Batam.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan tanggung jawab penyelenggaraan Negara tentu saja Laporan ini sangat terbuka terhadap saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan akuntabilitas publik.

Batam, 15 Oktober 2024  
Kepala Pangkalan PSDKP Batam



**Tuhan Hardianto Maha**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Batam merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari rencana pada tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja sesuai dengan Renstra 2020-2024. Penyusunan LKj merupakan bentuk pertanggung jawaban Kepala Pangkalan PSDKP Batam kepada Direktur Jenderal PSDKP atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program atau kegiatan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. Disamping itu juga sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran.

Seluruh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) dari masing-masing sasaran strategis Pangkalan PSDKP Batam Tahun pada triwulan III tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini karena sebagian besar kegiatan yang akan dilakukan telah disusun dan direncanakan pada awal tahun, sehingga pelaksanaan kegiatan pada periode berjalan sudah mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan. Selain itu adanya koordinasi dengan berbagai instansi dan serta pendampingan dari tim Direktorat serta sekretariat Ditjen. PSDKP turut mendukung tercapainya target kinerja Pangkalan PSDKP Batam.

Keberhasilan atau kegagalan atas pencapaian Sasaran Strategis diperoleh berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja yang telah dilakukan. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pangkalan PSDKP Batam triwulan III tahun 2024 sebesar **107,68**.

Alokasi anggaran Pangkalan PSDKP Batam TA. 2024 sebesar Rp. 59.765.587.000,-. Anggaran tersebut terbagi menjadi dua program, yaitu program pengelolaan kelautan dan perikanan serta program dukungan manajemen. Sampai dengan triwulan III tahun 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 32,960.362367,- atau 55,15%.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Isu Aktual Pengawasan SDKP .....	2
1.4 Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Batam .....	3
1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja .....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Rencana Strategis 2020-2024 Pangkalan PSDKP Batam .....	10
2.2 Visi, Misi dan Tujuan Pangkalan PSDKP Batam .....	10
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pangkalan PSDKP Batam .....	12
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>16</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Batam .....	16
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja .....	18
3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	57
3.4 Akuntabilitas Keuangan .....	58
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
5.1 Kesimpulan .....	59
5.2 Rekomendasi .....	59
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2024 .....	13
2. Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan SDKP Batam Triwulan III Tahun 2024 .....	16
3. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Batam Triwulan III Tahun 2024 .....	58

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Batam.....	5
2. Wilayah Administrasi Pangkalan PSDKP Batam .....	9

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam (Pangkalan PSDKP Batam) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar akan dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pengawasan SDKP 2020-2024.

Pelaksanaan program/kegiatan Pengawasan SDKP hanya dapat terselenggara dengan akuntabel, efektif dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Pengelolaan kinerja tersebut secara garis besar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kinerja, dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi.

Kewajiban suatu organisasi untuk melakukan pengelolaan kinerja telah diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai bentuk implementasi SAKIP tersebut, Pangkalan PSDKP Batam telah melakukan Pengukuran kinerja secara berkala dan melaporkannya secara rutin kepada Direktur Jenderal PSDKP.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan laporan Kinerja yaitu untuk melaporkan capaian program/kegiatan pada tahun 2024 dan sebagai bahan evaluasi atas program/kegiatan yang telah direncanakan apakah sudah sesuai dengan pencapaian yang diharapkan atau masih di bawah dari target kinerja yang sudah ditetapkan.

Tujuan dari penyusunan laporan kinerja ini yaitu sebagai laporan capaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Batam Tahun 2024.

## 1.3 Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pengawasan Pangkalan PSDKP Batam yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain:

1. Bidang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
  - a. Masih adanya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (KIA);
  - b. Masih adanya Kapal Ikan Indonesia (KII) yang melakukan operasi penangkapan pada wilayah yang tidak sesuai dengan izin;
  - c. Adanya kegiatan penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) ke luar negeri; dan
  - d. Adanya ikan hasil importasi yang masih belum sesuai dengan peruntukannya.
2. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
  - a. Adanya kegiatan pengelolaan produk kelautan berupa pasir laut tidak sesuai dengan wilayah pengelolaan yang diizinkan;

- b. Adanya kegiatan pemanfaatan pengelolaan ruang laut yang masih belum memiliki izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL); dan
- c. Masih adanya pemanfaatan pulau-pulau kecil tanpa dilengkapi dengan perizinan.

#### **1.4 Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Batam**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 69/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan Pengawasan SDKP Batam merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Pangkalan Pengawasan SDKP Batam menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu :

1. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas;
4. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan;
5. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;

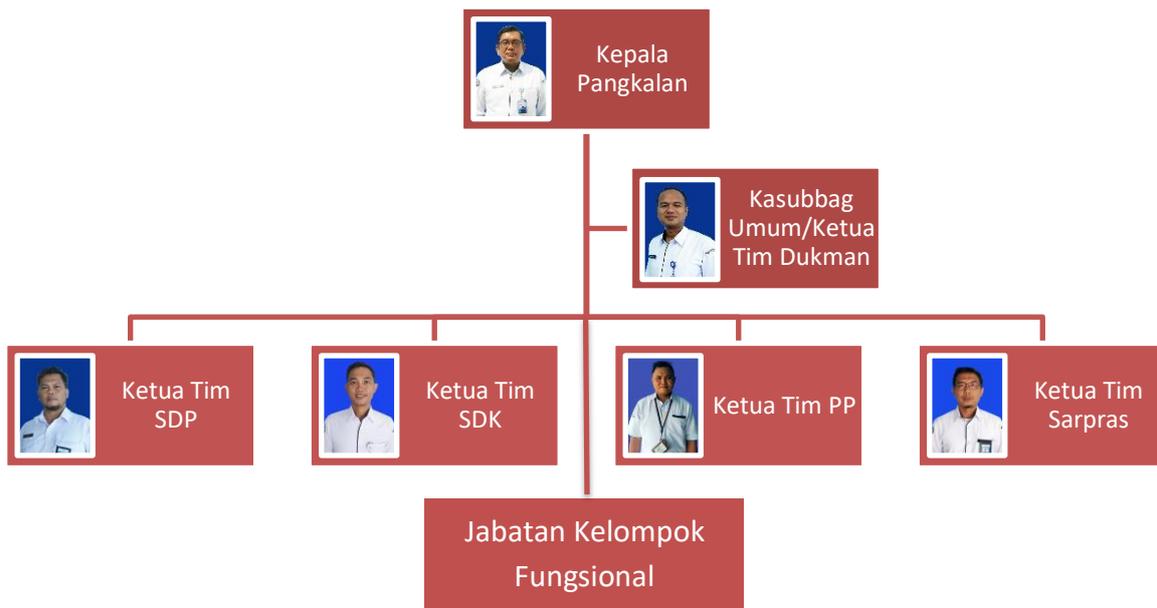
6. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Kemudian terhadap pelaksanaan tugas pokok tersebut, terdapat beberapa sasaran kegiatan di Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2024, antara lain:

1. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan yang terdiri dari:
  - a. Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Konservasi Perairan;
  - b. Pengawasan Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi;
  - c. Pengawasan Pengelolaan Jasa dan Produk Kelautan;
  - d. Pengawasan Pengelolaan WP3K;
  - e. Pengawasan Pengelolaan Limbah pada Pelaku Usaha Perikanan dan Non Perikanan; dan
  - f. Pengawasan terhadap adanya Kegiatan *Destructive Fishing*;
2. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang terdiri dari:
  - a. Pengawasan subsektor penangkapan dan pengangkutan ikan;
  - b. Pengawasan subsektor pembudidayaan ikan; dan
  - c. Pengawasan subsektor pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
3. Operasional Kapal Pengawas HIU 03, HIU MACAN 05 dan HIU 017
4. Operasional 13 *Speedboat/Rigid Inflate Boad/Rubbe Boat/Unit Reaksi Cepat*;
5. Pendampingan POKMASWAS;
6. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang terindikasi melakukan TPKP; dan
7. Manajemen urusan Ketata Usahaan

Pangkalan PSDKP Batam di pimpin oleh Kepala Pangkalan yang merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator. Kepala Pangkalan

membawahi Kepala Subbagian Umum yang merangkap sebagai Ketua Tim Dukungan Manajemen, Ketua Tim Intelejen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Ketua Tim Intelejen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Ketua Tim Penanganan Pelanggaran, Ketua Tim Prasarana, Sarana dan Operasional Kapal Pengawas serta Kelompok Jabatan Fungsional dengan total sumber daya manusia yang ada sejumlah 166 pegawai yang terdiri dari 84 PNS, 21 PPPK, 22 PPNPN dan 39 PJLP sebagaimana gambar 1 berikut.



**Gambar 1.** Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Batam

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing Tim Kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Batam diuraikan sebagai berikut:

### 1. Tim Kerja Dukungan Manajemen

Tugas :

Melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasu, rumah tangga serta pengelolaan BMN dan perlengkapan di lingkungan Pangkalan PSDKP Batam.

Fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, dan analisis data, dan pengolahan kinerja, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, serta penyusunan bahan pimpinan;
- b. Penyiapan perencanaan, pengembangan, disiplin, kesejahteraan, mutasi, tata usaha sumber daya manusia aparatur serta pengelolaan jabatan fungsional tertentu;
- c. Penyiapan kordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, tindak lanjut laporan hasil audit, manajemen risiko, dan penyusunan laporan keuangan, penatausahaan, pemanfaatan, penggunaan, penghapusan dan pelaporan barang milik negara, serta layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta urusan tata usaha, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.

**2. Tim Kerja Sarana, Prasarana dan Ops. Kapal Pengawas**

Tugas :

Melaksanakan kegiatan hasil dari perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan operasi armada lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

Fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan dan operasi armada pengawasan;
- b. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan

dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;  
dan

- c. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawas, pengawasan dan logistik armada pengawasan dan operasi armada pengawasan.

### **3. Tim Kerja Intelejen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan**

#### Tugas :

Melaksanakan kegiatan hasil dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan Sumber Daya Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

#### Fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya perikanan;
- b. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bidang penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya perikanan; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan sumber daya perikanan.

### **4. Tim Kerja Intelejen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan**

#### Tugas :

Melaksanakan kegiatan hasil dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan Sumber Daya Kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

#### Fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya kelautan;

- b. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bidang penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya kelautan; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan sumber daya kelautan.

## **5. Tim Kerja Penanganan Pelanggaran**

### Tugas :

Melaksanakan kegiatan hasil dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Direktorat Penanganan Pelanggaran, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

### Fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
- b. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bidang penyelenggaraan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan.

Pangkalan Pengawasan SDKP Batam dalam melaksanakan tugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di wilayah Kepulauan Riau, Bangka Belitung Sumatera Selatan dan Jambi membawahi 7 (tujuh) Satuan Pengawasan (Satwas) yaitu Satwas SDKP Tanjung Pinang, Satwas SDKP Natuna, Satwas SDKP Anambas, Satwas SDKP Bangka, Satwas SDKP Belitung, Satwas SDKP Palembang dan Satwas SDKP Tanjung Jabung Barat. Wilayah administratif Pangkalan Pengawasan SDKP Batam dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Wilayah Adminstratif Pangkalan PSDKP Batam

## 1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Batam tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

### a) **Bab I Pendahuluan**

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja, isu aktual pengawasan SDKP, serta tugas dan fungsi Pangkalan PSDKP Batam.

### b) **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan Kinerja tahun 2024.

### c) **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**

Menguraikan hasil pengukuran kinerja dan keuangan, evaluasi dan analisis capaian kinerja dan keuangan Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2024.

### d) **Bab IV Penutup**

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasi perbaikan kinerja ke depan.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1 Rencana Strategis 2020-2024 Ditjen. PSDKP**

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 23/KEP.DJ-PSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut:

### **2.2 Visi, Misi dan Tujuan**

#### **1. Visi dan Misi**

Dalam rangka memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi Ditjen PSDKP adalah:

**“Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”**

Dengan misi:

- 1 Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi
- 2 Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan
- 3 Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggungjawab;
- 4 Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP

## 2. Tujuan Dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Ditjen. PSDKP maka dirumuskan beberapa Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan KKP tahun 2020-2024 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, yaitu:

- 1) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 2) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui peningkatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 3) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen. PSDKP.

Berdasarkan Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 tersebut maka disusunlah Sasaran Program Ditjen. PSDKP yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 sebagaimana berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat
2. Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat
3. Pemantauan dan Operasi Armada efektif
4. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP
5. Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas

### **2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pangkalan PSDKP Batam**

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan iktikad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam periode waktu satu tahun, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: <sup>(1)</sup> Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; <sup>(2)</sup> Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; <sup>(3)</sup> Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; <sup>(4)</sup> Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja Pangkalan PSDKP Batam tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pada periode sebelumnya. Anggaran Pangkalan PSDKP Batam tahun 2024 sebesar Rp. 59.765.587.000,-. Untuk Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2024 pada tabel 1 berikut.

**Tabel 1.** Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	81
SK2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (Indeks)	91
		3	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	91
		4	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
SK3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100
		6	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100
SK4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	7	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100
SK5	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan	8	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)	100
SK6	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	9	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100
SK7	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	10	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)	100
SK8	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	11	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	80
		12	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK9	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	13	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93
SK10	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	14	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Indeks)	80
		15	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	75
		16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	100
		17	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP (Nilai)	70
		18	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Indeks)	82
		19	Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	84
		20	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	21
		22	Inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Batam (Inovasi)	1
		23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	94
		24	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		25	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	80
		26	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	93,76
		27	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	82

Pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IKM) dilakukan dengan berpedoman pada formulasi penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual Indikator Kinerja Utama/Informasi Indikator Kinerja. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian yang telah diraih dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan Laporan Kinerja yang didukung Aplikasi “**Kinerjaku**” yang merupakan aplikasi khusus berbasis informasi teknologi.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Batam

Berdasarkan pengelolaan kinerja tahun 2024, Capaian Indikator Kinerja Pangkalan PSDKP Batam meliputi 10 Sasaran Kegiatan dengan 14 IKU dan 13 IKM. Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Batam triwulan III tahun 2024 ditabulasikan dibawah ini.

**Tabel 2.** Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Batam triwulan III tahun 2024

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2024	Target September	Capaian September	%
SK1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif							
IKS.1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81,00	0,00		
SK10	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP							110,16
IKS.10.1	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam Data Dukung! ✓   <a href="#">🔗</a> Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	80,00	87,72	109,65
IKS.10.10	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Batam Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	0,00		
IKS.10.11	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Batam Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	0,00		
IKS.10.12	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93,76	0,00		
IKS.10.13	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82,00	0,00		
IKS.10.14	Inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Batam Tambah Data Dukung+	Inovasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,00	0,00		
IKS.10.2	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Batam Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75,00	0,00		
IKS.10.3	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Batam Data Dukung! ✓   <a href="#">🔗</a> Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00
IKS.10.4	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70,00	0,00		
IKS.10.5	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Batam Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82,00	0,00		
IKS.10.6	Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Batam Data Dukung! ✓   <a href="#">🔗</a> Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	84,00	84,00	85,20	101,43
IKS.10.7	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan Data Dukung! ✓   <a href="#">🔗</a> Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	80,00	100,00	120,00
IKS.10.8	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Pangkalan PSDKP Batam Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	21,00	0,00		
IKS.10.9	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Batam Data Dukung! ✓   <a href="#">🔗</a> Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	94,00	94,00	133,33	120,00

<b>SK2</b>	<b>Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif</b>							<b>101,60</b>	
IKS.02.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas Data Dukung1 ✓   📄   Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	91,00	91,00	94,45	103,79	
IKS.02.2	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas Data Dukung1 ✓   📄   Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	91,00	91,00	92,66	101,82	
IKS.02.3	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas Data Dukung1 ✓   📄   Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>SK3</b>	<b>Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan</b>								
IKS.03.1	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	0,00			
IKS.03.2	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	0,00			
<b>SK4</b>	<b>Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan</b>							<b>100,00</b>	
IKS.04.1	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan Data Dukung1 ✓   📄   Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>SK5</b>	<b>Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan</b>								
IKS.05.1	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	0,00			
<b>SK6</b>	<b>Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan</b>							<b>100,00</b>	
IKS.06.1	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan Data Dukung1 ✓   📄   Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>SK7</b>	<b>Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan</b>								
IKS.07.1	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	0,00			
<b>SK8</b>	<b>Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas</b>							<b>114,29</b>	
IKS.08.1	Indeks penganan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Data Dukung1 ✓   📄   Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	70,00	80,00	114,29	
IKS.08.2	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan Data Dukung1 ✓   📄   Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	70,00	80,00	114,29	
<b>SK9</b>	<b>Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas</b>							<b>120,00</b>	
IKS.09.1	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Data Dukung1 ✓   📄   Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93,00	70,00	87,50	120,00	

Analisa dan monitoring yang digunakan pada pencapaian kinerja tahun 2024 adalah membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan target yang di tetapkan dalam Rencana Aksi Tahun 2024.

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sampai dengan akhir Tahun 2024 Pangkalan PSDKP Batam telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.

Evaluasi dan analisis pada IKU1 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 1 (Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif)**

yaitu:

#### 1) Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	TW I	TW II	Triwulan III 2024		
Kode	Uraian				Target	Capaian	%
IKU1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	81	-	0	-	-	-

Target Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas sebesar 81 dan ditetapkan sebagai target semesteran. Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS merupakan sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kualitas terhadap kegiatan pembinaan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan pembinaan POKMASWAS untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS) secara baik dan efektif.

Terdapat dua kegiatan yang telah dilaksanakan sampai triwulan III tahun 2024, yaitu di Jambi dan Palembang. Kegiatan di Jambi dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2024 dengan anggota komisi IV DPR RI Bapak M.R. Ihsan Yunus, BA.,M.Comm.,ME.Con dengan POKMAWAS yang mengikuti yaitu Lubuk Intan, Lubuk Guci, Pematang Gelanggang, Pematang Kunyit dan Lestari Makmur. Sedangkan kegiatan di Palembang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2024 dengan anggota komisi IV DPR RI Ibu Hj. Sri Kustina serta POKMASWAS yang

mengikuti yaitu Sri Jaya, Maju Bersama, Manu, Ulak Jaya, Teluk Resau, Aur Jaya, Belanti Mandiri, Setule, Talang Enau dan Pancur. Alokasi anggaran untuk pembinaan POKMASWAS pada tahun 2024 sebesar Rp. 200.000.000,- dan sudah terealisasi sebesar Rp. 199.657.833,- atau 99,83%.

Evaluasi dan analisis pada IKU2, IKU3 dan IKU4 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 2 (Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif)** yaitu:

2) Indeks kinerja operasi kapal pengawas

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	TW I	TW II	Triwulan III 2024		
Kode	Uraian				Target	Capaian	%
IKU2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas	91	93,55	100,44	91	94,45	103,79

Target indeks Kinerja Operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2024 adalah 91 dan tercapai sebesar 94,45. Tercapaiannya Indikator ini dikarenakan kapal pengawas melakukan kegiatan operasi sebanyak total 84 hari operasi dengan jumlah total kapal yang diperiksa yaitu 244 unit kapal perikanan Indonesia dan 1 unit kapal perikanan asing. Jadi rata-rata dilakukan pemeriksaan kapal perikanan sebanyak lebih dari 2 unit per hari operasi dengan rincian sebagai berikut.

NO	NAMA KAPAL PENGAWAS	HARI OPS	RIKSA		
			KII	KIA	JML
1	KP. HIU MACAN 05	24	58	0	58
2	KP. HIU 03	27	80	1	81
3	KP. HIU 17	33	106	0	106
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>84</b>	<b>244</b>	<b>1</b>	<b>245</b>

Selain itu, tercapainya indikator ini dikarenakan cakupan wilayah pengawasan yang tinggi dilakukan oleh Kapal Pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam melalui operasi pengawasan di laut. Selain mengawasi pelaku usaha sumber

daya perikanan, Kapal pengawas juga melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha kelautan. Pagu anggaran untuk operasi kapal pengawas sebesar Rp. 17.352.857.000,- dan sudah terealisasi sebesar Rp. 10.083.062.010,- atau 58,11% dari pagu.

3) Indeks kinerja operasi speedboat pengawas

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	TW I	TW II	Triwulan III 2024		
Kode	Uraian				Target	Capaian	%
IKU3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	91	94,10	84,91	91	92,66	101,82

Target indeks Kinerja Operasi Speedboat lingkup Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2024 adalah 91 dan tercapai sebesar 92,66. Indikator ini mengukur kemajuan operasional speedboat agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Optimalnya indikator ini pada triwulan III tahun 2024 telah dilaksanakannya operasi pengawasan menggunakan *Speedboat/RIB/Rubberboat/Unit Reaksi Cepat* lingkup Pangkalan PSDKP Batam dengan total 264 hari operasi dengan total kapal yang diperiksa sebanyak 326 unit kapal perikanan Indonesia dan lokasi pemantauan/pengintaian terhadap kegiatan penyelendupan *baby lobster*. Namun dari 222 unit kapal perikanan Indonesia terdapat 1 unit kapal yang dilakukan tindak lanjut dikarenakan melakukan kegiatan penangkapan ikan tidak sesuai dengan izin. Terdapat satu *rubberboat* yang berada di Bangka masih belum melaksanakan kegiatan operasi pengawasan dikarenakan masih dalam tahap perawatan armada. Kemudian dalam operasinya, rata-rata dilakukan pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 1 unit per hari operasi dan 1 lokasi pengintaian dengan rincian sebagai berikut.

No	Speedboat/URC/RIB	Hari Ops	Riska Kapal
1	Dolphin 08	20	30
2	Dolphin 15	30	55
3	Dolphin 18	15	22
4	Dolphin 23	15	23
5	Dolphin 24	24	36
6	Napoleon 15	15	35
7	Napoleon 16	18	29
8	Napoleon 27	18	9
9	Napoleon 35	21	40
10	RIB/Sea Rider X-8	25	16
11	Rubber Boat Wilker Bangka	0	0
12	Hiu Biru 01	35	23
13	Hiu Biru 02	28	8
<b>TOTAL</b>		<b>264</b>	<b>326</b>

Jumlah hari operasi yang tinggi akan mempengaruhi cakupan wilayah pengawasan menggunakan *speedboat*. Pagu anggaran untuk operasi *speedboat* pengawas pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.856.940.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.057.732.346,- atau 56,96% dari pagu.

4) Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	TW I	TW II	Triwulan III 2024		
Kode	Uraian				Target	Capaian	%
IKU4	Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas	100	100	100	100	100	100,00

Target Presentase pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Batam pada triwulan III tahun 2024 adalah 100% dan tercapai 100%. Indikator ini mengukur pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas untuk mendukung operasi pengawasan SDKP baik logistik untuk kapal maupun untuk personel. Terdapat beberapa indikator untuk mencapai target kegiatan ini, yaitu:

- a. Pemenuhan logistik kapal:

- 1) Bahan bakar minyak (BBM)
- 2) Pelumas
- b. Pemenuhan logistik Personel:
  - 1) Bahan makanan
  - 2) Air tawar
  - 3) Alat-alat pelayanan (ATK, Bahan computer, komaliwan, peta, jurnal, dll)
  - 4) Senjata api dan amunisi.

Tercapainya indikator ini dikarenakan seluruh logistik kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam telah terpenuhi mulai dari BBM, Pelumas, Air, ATK, senjata api dan amunisi. Pagu anggaran untuk operasi kapal pengawas sebesar Rp. 11.553.637.000,- dan sudah terealisasi sebesar Rp. 7.570.447.769,- atau 65,52% dari pagu.

Evaluasi dan analisis pada IKU5 dan IKU6 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 3 (Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan)** yaitu:

5) Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	TW I	TW II	Triwulan III 2024		
Kode	Uraian				Target	Capaian	%
IKU5	Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan	100	-	-	-	-	-

Target persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan pada tahun 2024 dan menjadi target tahunan. Indikator merupakan target dalam pelaksanaan fisik renovasi bangunan Satwas SDKP Palembang. Bangunan tersebut sebelumnya merupakan bangunan yang digunakan oleh Balai Riset Perikanan Umum

dan Penyuluh Perikanan (BRPPUPP). Kemudian pada tanggal 27 Mei 2022 dilaksanakan serah terima bangunan dari Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai BA nomor B.2257/PSDKP.1/PL.510/V/2022. Selanjutnya bangunan ini direncanakan akan digunakan sebagai Kantor Satwas SDKP Palembang mengingat lokasinya yang strategis. Namun, bangunan tersebut harus dilakukan renovasi terlebih dahulu sebelum bisa digunakan. Karena bangunan ini sudah lama tidak difungsikan oleh pengguna sebelumnya. Sampai triwulan III tahun 2024 telah dilaksanakan sampai tahap perencanaan. Pagu anggaran untuk renovasi bangunan kantor Satwas SDKP Palembang sebesar Rp. 1.465.280.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 255.831.119,- atau 17,46%.

6) Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	TW I	TW II	Triwulan III 2024		
Kode	Uraian				Target	Capaian	%
IKU6	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP	100	-	-	-	-	-

Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Batam mendapat target sebesar 100% dan menjadi target tahunan. Perhitungan indikator ini membandingkan jumlah sarana pengawasan yang selesai dirawat dengan target kegiatan perawatan sarana serta prasarana pengawasan. Sarana pengawasan yang dimaksud meliputi kapal pengawas dan *speedboat* pengawas. Perawatan sarana terdiri dari perawatan pencegahan (*preventive maintenance*), perawatan prediktif (*predictive maintenance*) dan perawatan darurat (*breakdown maintenance*) Kapal Pengawas di lingkup PSDKP Batam yang siap operasi yaitu KP. HIU 03, KP. HIU 017 dan KP. HIU MACAN 05.

Kemudian untuk speedboat pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Batam berjumlah 13 unit. Pagu anggaran tahun 2024 untuk armada pengawasan yang dirawat sebesar Rp. 7.940.580.000,- serta terealisasi anggaran 29,88% atau sebesar Rp2.372.362.178,-.

Evaluasi dan analisis pada IKU7 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 4 (Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan)** yaitu:

- 7) Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	TW I	TW II	Triwulan III 2024		
Kode	Uraian				Target	Capaian	%
IKU7	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	100	100	100	100	100	100,00

Capaian Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan triwulan II tahun 2024 sebesar 100 dan tercapai 100. Hal ini dikarenakan adanya penambahan personil Polsus WP3K sehingga memaksimalkan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan. Selain itu adanya kegiatan pengawasan instansi terkait juga mendukung pencapaian ini. Pengawasan dilakukan terhadap 14 Pelaku usaha Pulau-Pulau Kecil, 87 Pelaku usaha ruang laut, 9 Pelaku usaha wilayah pesisir, 27 Pelaku usaha pencemaran perairan, 24 Pelaku usaha jasa kelautan, 12 Pelaku usaha pemanfaatan wilayah konservasi, 14 Pelaku usaha ikan dilindungi, 9 pelaku usaha produk kelautan dan 37 Pelaku usaha bebas kegiatan ikan yang merusak.

Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan tahun 2024 terbentuk dari beberapa komponen, antara lain:

a) Penangkapan/Pengambilan dan Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES

Mencakup kegiatan pengawasan penangkapan/pengambilan, pengembangbiakan/budidaya, perdagangan, penelitian dan pengembangan (termasuk bioteknologi dan biofarmakologi), akuaria, dan pertukaran, dan pemeliharaan untuk kesenangan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES sesuai ketentuan perlindungannya pada taksa pisces, crustacea, mollusca, coelenterata, echinodermata, amphibia, reptilia, algae dan biota perairan lainnya yang hidup di laut, air tawar dan air payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan/peredaran, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan.

b) Ekstraksi Garam

Kelompok kegiatan mencakup usaha ekstraksi garam yaitu produksi garam dengan pelarutan dan pemompaan, penguapan air laut atau air garam lainnya di tambak/empang/media lainnya, dan/atau penghancuran, pemisahan dan penyulingan garam.

c) Pemanfaatan wilayah pesisir (Reklamasi)

Pelaku usaha yang patuh adalah perorangan/badan yang melakukan usaha dengan memanfaatkan wilayah pesisir atau pulau-pulau kecil. Pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir fokus pada aktivitas reklamasi.

d) Pemanfaatan wilayah pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya oleh PMA dan/atau PMDN

Pengawasan pemanfaatan wilayah pulau-pulau kecil fokus pada kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) dan/atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

e) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL (Pengelolaan BMKT)

Pengelolaan BMKT meliputi pengangkatan dan/atau pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang bukan Obyek Diduga Cagar Budaya (ODCB).

f) Wisata tirta lainnya

Suatu usaha pengelolaan wisata bahari yang meliputi kegiatan pembangunan dermaga marina, pendirian resort, ponton wisata, *tracking* mangrove, *dive center/dive operator*, taman bawah air, serta kegiatan wisata tirta lainnya yang memanfaatkan ruang laut secara menetap paling singkat 30 hari.

g) Pemanfaatan Kawasan konservasi perairan

Pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan yaitu setiap orang/badan usaha yang melakukan kegiatan (yang wajib memiliki izin) di dalam kawasan konservasi perairan

h) Pemanfaatan Air Laut Selain Energi

Usaha yang meliputi Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum, Penampungan dan penyaluran air baku atau Aktifitas penunjang treatment air.

i) Pelaku usaha sektor kelautan, perikanan, dan usaha lainnya dalam pencegahan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya

Pelaku usaha adalah perorangan/badan yang melakukan usaha di bidang sektor kelautan, perikanan, dan usaha lainnya. Patuh dalam pencegahan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya.

j) Pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing*

Kapal perikanan dibawah 10 GT yang diperiksa dan tidak membawa alat/bahan dan/atau hasil tangkapan yang berasosiasi dengan destructive fishing (DF). Destructive fishing adalah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat/bahan yang merusak (bom ikan/racun ikan/setrum ikan).

k) Pelaku usaha pemanfaatan ruang laut (yang memiliki KKPR)

Parameter :

- Memiliki dokumen KKPR
- Kesesuaian jenis usaha dengan dokumen perizinan

Alokasi anggaran untuk pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan pada tahun 2024 sebesar Rp. 2.457.795.000,- serta terealisasi sebesar Rp1.459.409.202,- atau 59,38%.

Evaluasi dan analisis pada IKU8 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 5 (Tersedianya data dan informasi intelijen kelautan)** yaitu:

8) Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	TW I	TW II	Triwulan III 2024		
Kode	Uraian				Target	Capaian	%
IKU8	Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan	100	-	-	-	-	-

Target indikator Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan 100% menjadi target tahunan. Kegiatan pada indikator ini merupakan segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Sumber dalam kegiatan yaitu data dan informasi yang dikumpulkan oleh Polsus PWP3K atau pihak yang diberikan tugas oleh

pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi. Dalam penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan harus sudah dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah dikumpulkan atau diolah yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan dan pengambilan keputusan/ penindakan yang akan ditempuh. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan pada tahun 2024 sebesar Rp. 131.415.000,-.

Evaluasi dan analisis pada IKU9 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 6 (Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan)** yaitu:

- 9) Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	TW I	TW II	Triwulan III 2024		
Kode	Uraian				Target	Capaian	%
IKU9	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	100	100	100	100	100	100,00

Capaian Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan pada triwulan III tahun 2024 adalah 100. Hal ini dikarenakan kapabilitas pengawas perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam meningkat melalui bimtek atau pelatihan. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan bimtek ataupun pelatihan di masing-masing bidang, yaitu pengawasan kapal perikanan, pengawasan budidaya perikanan, pengawasan unit usaha pengolahan ikan dan pengawasan pemasaran

hasil perikanan. Pengawasan dilakukan terhadap 101 pelaku usaha pengelolaan perikanan.

Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan terdiri atas pengawasan rutin berbasis OSS dan pengawasan lainnya (pengawasan penangkapan ikan terukur, importasi hasil perikanan, kegiatan budidaya ikan prioritas nasional, dan/atau tindak lanjut aduan masyarakat) yang dilaksanakan secara rutin maupun insidental. yang terbentuk dari beberapa komponen berikut:

a) Pengawasan Rutin Berbasis OSS

Objek pengawasan rutin berbasis OSS adalah Id proyek pengawasan OSS yang diperoleh dari Pusat. Pengawasan rutin berbasis OSS dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

b) Pengawasan Penangkapan Ikan Terukur

Pengawasan penangkapan ikan terukur merupakan pemeriksaan kapal perikanan saat keberangkatan dan kedatangan untuk memastikan kesesuaian penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terukur. Pengawasan keberangkatan kapal perikanan mengacu pada peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. Pemeriksaan persyaratan administrative dan kelaikan teknis kapal perikanan saat keberangkatan dibuktikan dengan HPK-B dan/atau SLO melalui e-SLO.

c) Pengawasan Importasi Hasil Perikanan

Objek pengawasan importasi hasil perikanan adalah pelaku usaha yang memiliki Persetujuan Impor/PI tahun 2024 dimana data tersebut diperoleh dari Pusat.

Pemeriksaan importasi hasil perikanan dilakukan untuk memeriksa kesesuaian dokumen (**Persetujuan Impor, Surat Pelepasan dan NIB**) terkait pemasukan ikan dan hasil perikanan, jenis, volume ikan atau hasil perikanan, waktu pemasukan serta standar mutu/wajib yang masuk ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan kesesuaian distribusi peruntukan pemasukan hasil perikanan serta mengacu pada peraturan Dirjen PSDKP Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan dan .

d) Pengawasan Kegiatan Budidaya Ikan Program Prioritas Nasional

Objek adalah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang berlokasi usaha di kampung budidaya ikan berbasis komoditas dan pengembangan budidaya udang nasional yang ditetapkan. Pengawasan kegiatan budidaya ikan program prioritas nasional dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha dilengkapi dengan perizinan berusaha, lokasi sesuai RTRW/RDTR dan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik atau Cara Pembenihan Ikan yang Baik dengan mengacu pada peraturan Dirjen PSDKP Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan. Pengawasan kegiatan budidaya ikan program prioritas nasional dilaksanakan bersama oleh Pengawas Perikanan Pusat dan Pengawas Perikanan Daerah.

e) Pengawasan pengelolaan Komoditas Lobster, Kepiting, dan Rajungan

Objek pengawasan pengelolaan komoditas Lobster, Kepiting, dan Rajungan (LKR) adalah pelaku usaha distribusi komoditas benih bening lobster (*puerelus*), lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*)

lintas provinsi. Pengawasan pengelolaan Komoditas LKR Pengawasan dilaksanakan diluar instalasi karantina ikan dan/atau pengeluaran dengan memeriksa: dokumen perizinan berusaha, jenis dan jumlah komoditas yang akan dilalulintaskan, kondisi komoditas (bertelur atau tidak), kesesuaian ukuran yang ditentukan dan kesesuaian peruntukan.

f) Pengawasan Insidental

Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau sesama pelaku usaha terkait kegiatan usaha perikanan yang disampaikan melalui saluran/kanal resmi KKP/Ditjen PSDKP/UPT PSDKP serta penyisiran pelaku usaha illegal. Teknis pemeriksaan disesuaikan dengan jenis pengawasan yang dilakukan berdasarkan aduan (kegiatan usaha berbasis risiko, kegiatan penangkapan ikan terukur, kegiatan importasi hasil perikanan, kegiatan budidaya perikanan prioritas nasional, dan kegiatan distribusi lintas provinsi komoditas Lobster, Kepiting dan Rajungan.

Pada tahun 2024 pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan dianggarkan sebesar Rp. 1.344.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 835.427.096,- atau 62,16%.

Evaluasi dan analisis pada IKU10 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 7 (Tersedianya data dan informasi intelijen perikanan)** yaitu:

10) Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	TW I	TW II	Triwulan III 2024		
Kode	Uraian				Target	Capaian	%
IKU10	Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan	100	-	-	-	-	-

Target indikator Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan 100% menjadi target tahunan. Kegiatan pada indikator ini merupakan segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Sumber dalam kegiatan yaitu data dan informasi yang dikumpulkan oleh pengawas perikanan atau pihak yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi. Dalam penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan harus sudah dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah dikumpulkan atau diolah yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan, dan pengambilan keputusan/ penindakan yang akan ditempuh. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan dan tindak lanjut pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan pada tahun 2024 sebesar Rp. 61.790.000,-.

Evaluasi dan analisis pada IKU11 dan IKU12 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 8 (Terselenggarannya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas)** yaitu:

11) Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	TW I	TW II	Triwulan III 2024		
Kode	Uraian				Target	Capaian	%
IKU11	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	80	80	80	70	80	114,29

Capaian indeks pengenaan sanksi administratif Pangkalan PSDKP Batam sebesar 100. Capaian ini merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penanganan sanksi administratif berdasarkan PERMEN-KP nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di bidang Kelautan dan

Perikanan. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang KP berdasarkan penetapan pertama dengan keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose.

Pada triwulan III tahun 2024, Pangkalan PSDKP Batam telah melaksanakan pengenaan sanksi administratif pada 4 unit kapal perikanan Indonesia yaitu berupa Surat Peringatan Pertama (SP-1) dengan rincian sebagai berikut.

No	Pelaku Usaha	Uraian Pelanggaran	Nilai Denda
1	PT. Dirgantara Inti Abadi	Pelanggaran atas Kegiatan yang mengakibatkan pencemaran/atau kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya	<b>Rp225.486.995,00</b>
2	PT. Megah Puri Lestari	1). Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang Tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT); 2). Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dikali total nilai investasi	<b>Rp15.397.766,00</b>
3	PT. Eunindo Usaha Mandiri (EUM)	1). Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang Tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)	<b>Rp212.391.600,00</b>

No	Pelaku Usaha	Uraian Pelanggaran	Nilai Denda
4	PT. Bintang Mahkota Sukses	1) Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang Tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) 2) Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut	<b>Rp12.992.711,00</b>
5	PT. Sumber Alam Antarnusa	1) Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang Tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) 2) Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut	<b>Rp68.577.492,00</b>
6	PT. Buah Tiara Nusa	1) Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang Tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) 2) Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut	<b>Rp98.456.330,00</b>
7	PT. Bintang Sembilan Sembilan Persada	1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)	<b>Rp191.470.000,00</b>

No	Pelaku Usaha	Uraian Pelanggaran	Nilai Denda
8	PT. Cahaya Rahmata Pura Jaya	1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) 2. Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut	<b>Rp239.827.450,00</b>
9	PT. Jaku Jaya	1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)	<b>Rp18.076.051,00</b>
10	IPR Edy Anwar	1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)	<b>Rp18.680.000,00</b>
11	PT. Buana Cipta Mandala	1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)  2. Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dikali total nilai investasi	<b>Rp62.506.000,00</b>

No	Pelaku Usaha	Uraian Pelanggaran	Nilai Denda
12	PT. Dabo Bina Sukses	<p>1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)</p> <p>2. Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dikali total nilai investasi</p>	<b>Rp50.460.007,00</b>
13	PT. Bahari Berkah Madani	<p>1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)</p>	<b>Rp181.291.894,00</b>
14	PT. Mitra Bangka Resources	<p>1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)</p>	<b>Rp116.633.250,00</b>
15	IPR Perkumpulan Rezeki Anak Melayu	<p>1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)</p>	<b>Rp32.876.800,00</b>

No	Pelaku Usaha	Uraian Pelanggaran	Nilai Denda
16	PT Asia Metal International	<p>1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)</p> <p>2. Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dikali total nilai investasi</p>	<b>Rp143.907.984,00</b>
17	PT. Putra Bentan Cabang Natuna	<p>1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)</p> <p>2. Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dikali total nilai investasi</p>	<b>Rp19.567.608,00</b>
18	PT. Multi Mineral Indonesia	<p>1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)</p> <p>2. Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dikali total nilai investasi</p>	<b>Rp113.104.030,00</b>

No	Pelaku Usaha	Uraian Pelanggaran	Nilai Denda
19	PT. Cemara Intan Shipyard	1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)  2. Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dikali total nilai investasi	<b>Rp16.590.000,00</b>
20	CV. Saputra Kembar	1). Pelanggaran terhadap Ketentuan dan/atau Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi 2). Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut 3). Pelanggaran atas Kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya	<b>Rp39.616.841,00</b>
21	KM. SOYO BAROKAH	Pelanggaran Perizinan Berusaha Berupa Melakukan Penangkapan Ikan di luar daerah Penangkapan ikan yang telah ditentukan dalam dokumen perizinan dan mematikan VMS	Rp108.033.000,00
22	KM. SRI INTAN -12	Pelanggaran Perizinan Berusaha Berupa Melakukan Penangkapan Ikan di luar daerah Penangkapan ikan yang telah ditentukan dalam dokumen perizinan	Rp16.965.000,00
23	PT.SUMBER LAUT ALAM	pelanggaran Perizinan Berusaha Berupa Melakukan Pelanggaran Peruntukan importasi komoditas Perikanan	Rp26.552.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>Rp2.029.461.309,00</b>

Pangkalan PSDKP Batam tahun 2024 untuk pengenaan sanksi administratif mendapat pagu sebesar Rp 482.610.000,- dan sampai dengan triwulan III sudah terealisasi sebesar Rp. 231.877.041,- atau 48,05%.

12) Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	TW I	TW II	Triwulan III 2024		
Kode	Uraian				Target	Capaian	%
IKU12	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	80	80	80	70	80	114,29

Capaian indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan sanksi administratif Pangkalan PSDKP Batam sebesar 80. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Tercapainya indikator ini dikarenakan sudah dilaksanakannya tindak lanjut terhadap 84 unit kapal perikanan Indonesia yang indikasi melakukan pelanggaran dari total 114 kapal perikanan Indonesia. Terhadap kapal yang lain dilakukan proses tindak lanjut pada triwulan III tahun 2024 dikarenakan sampai dengan berakhirnya triwulan II tahun 2024 kapal masih melakukan kegiatan penangkapan ikan dan belum Kembali ke Pelabuhan Pangkalan sebagaimana tabel berikut.

No	Nomor Lembar Indikasi	Nama Kapal (Tanpa KM)	Jenis Pelanggaran	Pemeriksaan
1	L - 034/ FMC / I / 2024	ANUGERAH BAHARI SUKSES	Jalur Penangkapan	sudah
2	L - 100/ FMC / I / 2024	SUPER REJEKI	Jalur Penangkapan	sudah
3	L - 157/ FMC / I / 2024	ANGKASA 89	Jalur Penangkapan	sudah
4	L - 027/ FMC / II / 2024	TRISTAN MANDIRI VII	Jalur Penangkapan	sudah
5	L - 129/ FMC / II / 2024	MEGATAMA PUTRI	Jalur Penangkapan	sudah
6	L - 130/ FMC / II / 2024	TENAGA BARU	Jalur Penangkapan	sudah
7	L - 201/ FMC / III / 2024	SINABUNG	Jalur Penangkapan	sudah
8	L - 236/ FMC / III / 2024	REZEKI BARU - 9	Jalur Penangkapan	sudah
9	L - 300/ FMC / III / 2024	REZEKI BINTANG JAYA - III	Jalur Penangkapan	sudah

No	Nomor Lembar Indikasi	Nama Kapal (Tanpa KM)	Jenis Pelanggaran	Pemeriksaan
10	L - 332/ FMC / III / 2024	VICTOR SAMUDRA	Jalur Penangkapan	sudah
11	L - 337/ FMC / III / 2024	REZEKI BINTANG JAYA - II	Jalur Penangkapan	sudah
12	L - 355/ FMC / III / 2024	PERINTIS DAMAI	Jalur Penangkapan	sudah
13	L - 356/ FMC / III / 2024	HASIL KARIMUN - II	Jalur Penangkapan	sudah
14	L - 357/ FMC / III / 2024	PENGUIN BARU	Jalur Penangkapan	sudah
15	L - 393/ FMC / III / 2024	MEGA RIA	Jalur Penangkapan	sudah
16	L - 399/ FMC / III / 2024	SEMPURNA JAYA	Jalur Penangkapan	sudah
17	L - 433/ FMC / III / 2024	UDANG SARI - 4	Jalur Penangkapan	sudah
18	L - 434/ FMC / III / 2024	DWI DAYA	jalur penangkapan	sudah
19	L - 437/ FMC / III / 2024	BINTANG CAHAYA	Pelabuhan Pangkal/Muat	sudah
20	L - 439/ FMC / III / 2024	HAITERY - II	Pelabuhan Pangkal/Muat	sudah
21	L - 449/ FMC / III / 2024	CHAMPION CUMI	Jalur Penangkapan	sudah
22	L - 451/ FMC / III / 2024	MARVANDER 66	Jalur Penangkapan	sudah
23	L - 452/ FMC / III / 2024	DEDI JAYA - 4	Jalur Penangkapan	sudah
24	L - 464/ FMC / III / 2024	PASIFIK	Jalur Penangkapan	sudah
25	L - 468/ FMC / III / 2024	SETIA JAYA	Jalur Penangkapan	sudah
26	L - 006/ FMC / IV / 2024	BATAM ASAHAN	Jalur Penangkapan	sudah
27	L - 007/ FMC / IV / 2024	NAPOLEON	Jalur Penangkapan	sudah
28	L - 008/ FMC / IV / 2024	PULAU SAMBU - II	Jalur Penangkapan	sudah
29	L - 012/ FMC / IV / 2024	REZEKI BARU	Jalur Penangkapan	sudah
30	L - 032/ FMC / IV / 2024	NASIB JAYA BARU I	Jalur Penangkapan	sudah
31	L - 036/ FMC / IV / 2024	MIKO NATA 388	Jalur Penangkapan	sudah
32	L - 053/ FMC / IV / 2024	SUMBER LAUT IV	Jalur Penangkapan	sudah
33	L - 057/ FMC / IV / 2024	SINAR NELAYAN	Jalur Penangkapan	sudah
34	L - 066/ FMC / IV / 2024	INDAH PERKASA	Jalur Penangkapan	sudah
35	L - 074/ FMC / IV / 2024	BALENO	Jalur Penangkapan	sudah
36	L - 098/ FMC / IV / 2024	AULIA REZEKI	Jalur Penangkapan	sudah
37	L - 099/ FMC / IV / 2024	TANJUNG SARI PERKASA	Jalur Penangkapan	sudah
38	L - 127/ FMC / IV / 2024	REZEKI MULIA 77	Jalur Penangkapan	sudah
39	L - 142/ FMC / IV / 2024	GARUDA MAS	Jalur Penangkapan	sudah
40	L - 147/ FMC / IV / 2024	BINTANG MAS NUSANTARA	Jalur Penangkapan	sudah
41	L - 159/ FMC / IV / 2024	SINAR BONE 6	Jalur Penangkapan	sudah
42	L - 186/ FMC / IV / 2024	KENCANA DUA A	Jalur Penangkapan	sudah
43	L - 201/ FMC / IV / 2024	SINAR ASALLI	Pelabuhan Pangkal/Muat	sudah
44	L - 202/ FMC / IV / 2024	DELI ASAHAN	Pelabuhan Pangkal/Muat	sudah
45	L - 203/ FMC / IV / 2024	ANUGERAH JAYA ABADI - I	Pelabuhan Pangkal/Muat	sudah
46	L - 204/ FMC / IV / 2024	ANUGERAH PRATAMA	Pelabuhan Pangkal/Muat	sudah
47	L - 228/ FMC / IV / 2024	CAHAYA ALDO 02	Jalur Penangkapan	sudah
48	L - 235/ FMC / IV / 2024	ANUGERAH 82	Pelabuhan Pangkal/Muat	sudah
49	L - 253/ FMC / IV / 2024	SURYA HASIL LAUT - 9	Jalur Penangkapan	sudah
50	L - 257/ FMC / IV / 2024	SURYA CITRA NUSANTARA 08	Jalur Penangkapan	sudah
51	L - 279/ FMC / IV / 2024	KURNIA WIJAYA I	DPI	sudah
52	L - 293/ FMC / IV / 2024	SURYA CITRA NUSANTARA - 07	Jalur Penangkapan	sudah
53	L - 001/ FMC / V / 2024	SUMBER LAUT	Jalur Penangkapan	sudah

No	Nomor Lembar Indikasi	Nama Kapal (Tanpa KM)	Jenis Pelanggaran	Pemeriksaan
54	L - 005/ FMC / V / 2024	SINAR JAYA - I	Jalur Penangkapan	sudah
55	L - 013/ FMC / V / 2024	JAYA UTAMA	Jalur Penangkapan	sudah
56	L - 025/ FMC / V / 2024	PULAU SAMBU - I	Jalur Penangkapan	sudah
57	L - 048/ FMC / V / 2024	SUMBER MANDIRI	Jalur Penangkapan	sudah
58	L - 052/ FMC / V / 2024	SUMBER JADI	Jalur Penangkapan	sudah
59	L - 053/ FMC / V / 2024	SUMBER INDAH	Jalur Penangkapan	sudah
60	L - 054/ FMC / V / 2024	SUMBER FORTUNA	Jalur Penangkapan	sudah
61	L - 057/ FMC / V / 2024	ANUGERAH - 68	Jalur Penangkapan	sudah
62	L - 058/ FMC / V / 2024	PACIFIC II	Jalur Penangkapan	sudah
63	L - 060/ FMC / V / 2024	ANUGERAH BAHARI	Jalur Penangkapan	sudah
64	L - 061/ FMC / V / 2024	FACIFIC MEMORY II	Jalur Penangkapan	sudah
65	L - 062/ FMC / V / 2024	SURYA CITRA NUSANTARA - 9	Jalur Penangkapan	sudah
66	L - 066/ FMC / V / 2024	SURYA HASIL LAUT - 8	Jalur Penangkapan	sudah
67	L - 067/ FMC / V / 2024	SURYA HASIL LAUT - 3	Jalur Penangkapan	sudah
68	L - 078/ FMC / V / 2024	MAJU JAYA - 688	Jalur Penangkapan	sudah
69	L - 079/ FMC / V / 2024	KENCANA	Jalur Penangkapan	sudah
70	L - 088/ FMC / V / 2024	ULAM SARI - 5	DPI	sudah
71	L - 089/ FMC / V / 2024	INTAN REJEKI 212	DPI	sudah
72	L - 098/ FMC / V / 2024	VARIA MINA	Jalur Penangkapan	sudah
73	L - 104/ FMC / V / 2024	SINAR ALAM	Jalur Penangkapan	sudah
74	L - 112/ FMC / V / 2024	NAGA TUING	Jalur Penangkapan	sudah
75	L - 121/ FMC / V / 2024	SINAR MAS	Jalur Penangkapan	sudah
76	L - 140/ FMC / V / 2024	DELI MAJU - II	Pelabuhan Pangkal/Muat	sudah
77	L - 158/ FMC / V / 2024	DJADI MARI IN	Jalur Penangkapan	sudah
78	L - 182/ FMC / V / 2024	BATAM MAS	Pelabuhan Pangkal/Muat	sudah
79	L - 187/ FMC / V / 2024	SINAR MUTIARA	Jalur Penangkapan	sudah
80	L - 188/ FMC / V / 2024	REZEKI OMEGA INDAH	Jalur Penangkapan	sudah
81	L - 189/ FMC / V / 2024	ANUGERAH JAYA ABADI - I	Jalur Penangkapan	sudah
82	L - 197/ FMC / V / 2024	PEMBURU SAMUDERA XV	Jalur Penangkapan	sudah
83	L - 208/ FMC / V / 2024	SINAR BAYU UTAMA	Jalur Penangkapan	sudah
84	L - 236/ FMC / V / 2024	SINAR MAS	Jalur Penangkapan	sudah
85	L - 242/ FMC / V / 2024	UNITED -V	Pelabuhan Pangkal/Muat	Belum
86	L - 243/ FMC / V / 2024	SINAR BAHARI SUKSES	Jalur Penangkapan	Belum
87	L - 246/ FMC / V / 2024	SETIA AL	Jalur Penangkapan	Belum
88	L - 247/ FMC / V / 2024	KM. SINAR INTAN - II	Jalur Penangkapan	Belum
89	L - 256/ FMC / V / 2024	VARIA PRIMA	Jalur Penangkapan	Belum
90	L - 280/ FMC / V / 2024	SANTOLI JAYA	Pelabuhan Pangkal/Muat	Belum
91	L - 291/ FMC / V / 2024	BANDAR NELAYAN UTAMA	Jalur Penangkapan	Belum
92	L - 295/ FMC / V / 2024	MEKAR JAYA VIII	Jalur Penangkapan	Belum
93	L - 309/ FMC / V / 2024	UNITED - X	Jalur Penangkapan	Belum
94	L - 312/ FMC / V / 2024	PEMBURU SAMUDRA XII	Jalur Penangkapan	Belum
95	L - 319/ FMC / V / 2024	ANDESSON JAYA 3	Jalur Penangkapan	Belum
96	L - 350/ FMC / V / 2024	ANTENA	Pelabuhan Pangkal/Muat	Belum
97	L - 351/ FMC / V / 2024	SINAR BERSAMA	Pelabuhan Pangkal/Muat	Belum

No	Nomor Lembar Indikasi	Nama Kapal (Tanpa KM)	Jenis Pelanggaran	Pemeriksaan
98	L - 352/ FMC / V / 2024	LESTARI BAHARI	Pelabuhan Pangkal/Muat	Belum
99	L - 353/ FMC / V / 2024	SINAR NELAYAN	Pelabuhan Pangkal/Muat	Belum
100	L - 354/ FMC / V / 2024	ANUGERAH REZEKI	Pelabuhan Pangkal/Muat	Belum
101	L - 355/ FMC / V / 2024	ANTEVE	Pelabuhan Pangkal/Muat	Belum
102	L - 356/ FMC / V / 2024	REZEKI BERSAMA BARU - I	Pelabuhan Pangkal/Muat	Belum
103	L - 357/ FMC / V / 2024	PALEMBANG INDAH V	Pelabuhan Pangkal/Muat	Belum
104	L - 376/ FMC / V / 2024	SUMBER MAS	Pelabuhan Pangkal/Muat	Belum
105	L - 382/ FMC / V / 2024	NAPOLEON	Pelabuhan Pangkal/Muat	Belum
106	L - 383/ FMC / V / 2024	INKA MINA 833	Jalur Penangkapan	Belum
107	L - 465/ FMC / V / 2024	SINAR BAHARI SUKSES	Jalur Penangkapan	Belum
108	L - 496/ FMC / V / 2024	MU	Jalur Penangkapan	Belum
109	L - 001/ FMC / VI / 2024	SUMBER JADI	Jalur Penangkapan	Belum
110	L - 038/ FMC / VI / 2024	PULAU SAMBU - I	Jalur Penangkapan	Belum
111	L - 057/ FMC / VI / 2024	SUMBER MUTIARA	Jalur Penangkapan	Belum
112	L - 068/ FMC / VI / 2024	SUMBER MANDIRI	Jalur Penangkapan	Belum
113	L - 163/ FMC / VI / 2024	ANTARTIKA	Jalur Penangkapan	Belum
114	L - 022/ FMC / VII / 2024	ANGKASA 88	Jalur Penangkapan	Belum

Pangkalan PSDKP Batam tahun 2024 untuk analisis pemantauan kapal perikanan mendapat pagu sebesar Rp 448.200.000,- dan sampai dengan triwulan III sudah terealisasi sebesar Rp. 230.104.041,- atau 51,34%.

Evaluasi dan analisis pada IKU13 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 9 (Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas)** yaitu:

13) Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	TW I	TW II	Triwulan III 2024		
Kode	Uraian				Target	Capaian	%
IKU13	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	93	40	100	70	87,5	120,00

Capaian Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan masih kurang optimal pada triwulan III tahun 2024. Indikator ini merupakan perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penyelesaian penyidikan tindak

pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan proses penyidikan mulai tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan mengacu kepada Keputusan Dirjen PSDKP Nomor : KEP.372/DJ-PSDKP/2011 perihal Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan. Capaian ini membandingkan antara Jumlah kasus ditahun berjalan yang telah selesai ditangani. Tercapaiannya indikator ini dikarenakan kasus di Pangkalan PSDKP Batam tahun 2024 telah menangani 4 kasus TPP dan seluruhnya telah tahap III dengan rincian sebagai berikut.

NO	NAMA TERSANGKA	NAMA KAPAL	PELANGGARAN	KETERANGAN
1	<b>MIN TUN alias NAI THIN TUN</b>	KM. PSF 2500	Melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Selat Malaka, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap pukat hela atau trawl yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan	INCRAHT
2	<b>KYAW HTAT</b>	KM. PKFB 1269	Melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Selat Malaka, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap pukat hela atau trawl yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan	INCRAHT
3	<b>VO VAN CANG</b>	KM.BV 4417 TS	Melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Selat Malaka, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap Pair trawl yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan	INCRAHT
4	<b>BUI CHI HONG</b>	KM.BV 1182 TS	Melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Selat Malaka, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap Pair trawl yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan	INCRAHT

NO	NAMA TERSANGKA	NAMA KAPAL	PELANGGARAN	KETERANGAN
5	<b>NGUYEN TRI HOANG</b>	KM. KG 9324 TS	Melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Selat Malaka, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap pukat hela atau trawl yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan	INCRAHT
6	<b>NGUYEN TRI AN</b>	KM. KG 90520 TS	Melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Selat Malaka, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap pukat hela atau trawl yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan	INCRAHT
7	<b>RIZAL</b>	Pompong Tanpa Nama	Melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Selat Malaka, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap pukat hela atau trawl yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan	Tahap II
8	<b>CAO VAN LUYEN</b>	KM. BV 93481 TS	Melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Selat Malaka, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap pukat hela atau trawl yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan	Tahap I

Pangkalan PSDKP Batam tahun 2024 mendapat pagu sebesar Rp 551.390.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 373.206.094,- atau 67,68%.

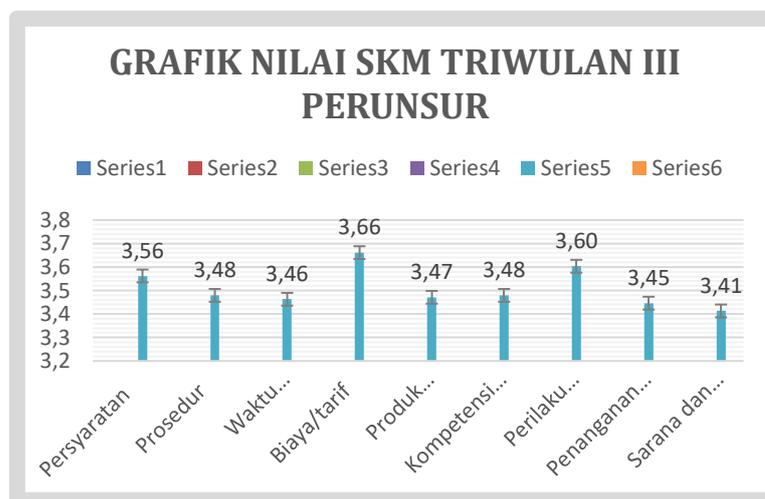
Evaluasi dan analisis pada IKU14, IK15, IK16, IK17, IK18, IK19, IK20, IK21, IK22, IK23, IK24, IK25, IK26 dan IK27 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 10 (Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP)** yaitu:

14) Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	TW I	TW II	Triwulan III 2024		
Kode	Uraian				Target	Capaian	%
IKU14	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan	80	88,70	89,63	80	87,72	109,65

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2024 adalah 87,72. Untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna SLO dilakukan survey pada setiap triwulannya. Kegiatan IKM bertujuan untuk mengukur pelayanan terhadap pengguna layanan SLO baik yang ada di UPT Pangkalan PSDKP Batam maupun Satuan Pengawas. Diharapkan terhadap kegiatan ini adalah adanya evaluasi untuk meningkatkan serta meminimalisir kekurangan pada pelayanan yang ada.

Capaian tersebut diperoleh dari 2024 responden pengguna layanan baik di UPT, Satwas maupun wilker. Dengan indeks 87,72 menandakan bahwa pelayanan di lingkup Pangkalan PSDKP Batam telah dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini dikarenakan pengawas perikanan serta petugas pelayanan telah mengikuti pelatihan Budaya Pelayanan Prima sehingga kualitas pelayanan dapat maksimal dengan rincian sebagai berikut.



Pada tahun 2024 pagu anggaran IKM sebesar Rp. 86.869.000.- dan sudah terealisasi sebesar Rp. 18.150.336,- atau 20,89%.

15) Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	TW I	TW II	Triwulan III 2024		
Kode	Uraian				Target	Capaian	%
IK15	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Pangkalan PSDKP Batam	75	-	-	-	-	-

Target Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Pangkalan PSDKP Batam tahun 2024 adalah 75 dan menjadi target tahunan. Pelaksanaan WBK nantinya akan berdasarkan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan jika dinilai melalui penilaian mandiri

berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2024 pagu anggaran pelaksanaan reformasi birokrasi sebesar Rp. 78.815.000.- dan sudah terealisasi sebesar Rp. 18.150.336- atau 23,03%.

16) Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	TW I	TW II	Triwulan III 2024		
Kode	Uraian				Target	Capaian	%
IK16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Batam	100	100	100	100	100	100,00

Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Batam mendapat target 100% dan tercapai 100%. Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Tercapainya indikator ini dikarenakan telah dilakukan pengendalian mitigasi melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilakukan setiap triwulan pada pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian. Adapun anggaran tahun 2024 untuk Pelaksanaan pengelolaan keuangan sebesar Rp. 206.529.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 201.434.329,- atau 97,53%.

17) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	TW I	TW II	Triwulan III 2024		
Kode	Uraian				Target	Capaian	%
IK17	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP	70	-	-	-	-	-

Target Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP yaitu 70 dan menjadi target tahunan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar

kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip; dan
- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana.

Adapun anggaran tahun 2024 untuk Pelaksanaan pengelolaan kearsipan da persuratan sebesar Rp. 34.631.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.716.576,- atau 82,92%.

#### 18) Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	TW I	TW II	Triwulan III 2024		
Kode	Uraian				Target	Capaian	%
IK18	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Batam	82	-	82,26	-	-	-

Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Batam tahun 2022 adalah 82 dan tercapai 82,26 pada semester I. Nilai diperoleh dari komponen pembentuk yaitu <sup>(1)</sup> Kualifikasi yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP, <sup>(2)</sup> Kompetensi yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), <sup>(3)</sup> Kinerja yaitu berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN melalui aplikasi Penilaian Perstasi Kerja Online KKP yang dikolaborasikan dengan database kepegawaian

(SIMPEG Online KKP) dan <sup>(4)</sup> Disiplin yaitu berkenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin.

Adapun anggaran tahun 2024 untuk Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Batam yaitu penatausahaan SDM dan jabatan fungsional sebesar Rp. 125.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 99.661.541,- atau 79,73%.

19) Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	TW I	TW II	Triwulan III 2024		
Kode	Uraian				Target	Capaian	%
IK19	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Batam	84	-	-	84	85,20	101,43

Target Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Batam yaitu 84 dan tercapai 85,20. SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Hasil penilaian oleh Inspektorat Mitra berdasarkan lembar kerja evaluasi yang disusun itjen dengan mengacu pada lembar kerja evaluasi AKIP oleh KEMENPAN RB. Anggaran untuk pengelolaan kinerja organisasi pada tahun 2024 sebesar Rp. 27.100.000,- dan sudah terealisasi sebesar Rp. 22.341.499,- atau 82,44%.

20) Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	TW I	TW II	Triwulan III 2024		
Kode	Uraian				Target	Capaian	%
IK20	Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	80	80	80	80	100	120,00

Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan ditargetkan 80% dan tercapai 100%. Hal ini dikarenakan seluruh hasil evaluasi dari Itjen telah di tindaklanjuti Pangkalan PSDKP Batam. Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP.

Pada tahun 2024 pagu anggaran untuk indikator ini yaitu pengelolaan keuangan sebesar Rp. 206.529.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 201.434.329,- atau 97,53%.

21) Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	TW I	TW II	Triwulan III 2024		
Kode	Uraian				Target	Capaian	%
IK21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam	21	-	-	-	-	-

Target Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam adalah 21 dan menjadi target tahunan. Tercapainya indikator ini karena

terlaksananya serta pemenuhan dokumen dalam budaya kerja. Implementasi program-program budaya yaitu 5 menit sebelum jadwal, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, upayakan data terkini, organisasikan rapat, catat, aksi, arsipkan, tegakan aturan dengan akuntabel dan transparan, belanjakan anggaran secara realistis, akuntabel dan Amanah, ASN PSDKP produktif kerja, menyelesaikan tugas dengan tepat, hormat, motivasi dan inisiatif, gelorakan Gerakan hemat energi telah diterapkan di Pangkalan PSDKP Batam. Pada tahun 2024 pagu anggaran untuk implementasi program budaya kerja yang dihasilkan yaitu Innovation Bootcamp dan Lomba Inovasi Tahun 2024 sebesar Rp. 19.859.000,- dan sudah terealisasi sebesar Rp. 6.927.100,- atau 34,88%.

22) Inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	TW I	TW II	Triwulan III 2024		
Kode	Uraian				Target	Capaian	%
IK22	Inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Batam	1	-	-	-	-	-

Target jumlah inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Batam adalah 1 inovasi dan menjadi target tahunan. Persyaratan inovasi: memenuhi seluruh kriteria inovasi selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatutan. Pada tahun 2024 pagu anggaran untuk implementasi program budaya kerja yang dihasilkan yaitu yaitu Innovation Bootcamp dan Lomba Inovasi Tahun 2024 sebesar Rp. 19.859.000,- dan sudah terealisasi sebesar Rp. 6.927.100,- atau 34,88%.

23) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	TW I	TW II	Triwulan III 2024		
Kode	Uraian				Target	Capaian	%
IK23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Batam	94	133,33	133,33	94	133,33	120,00

Capaian persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Batam mencapai 133,33%. Semula pengukuran indikator ini menggunakan aplikasi *bitrix.24*, namun sekarang sudah diganti dengan aplikasi portal.kkp (*collaboration office/coofis*). Belum optimalnya pencapaian ini karena pegawai *coofis* yang telah *memposting* pada halaman berita *coofis Postingan* yang dilakukan yaitu minimal delapan kali dalam tiga bulan dengan memperhatikan isi berita yang mengandung 5W+1H. Kemudian seluruh dokumen yang digunakan dalam pengukuran Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar telah terpenuhi seluruhnya.

Diperoleh dari komponen pembentuk yaitu <sup>(1)</sup> dokumen yang terdiri dari Renstra 2020-2024, Dokumen Perjanjian Kinerja (Level 3 dan 4), Manual IKU, Rencana Aksi dan Laporan Kinerja. <sup>(2)</sup> keikutsertaan pada aplikasi *coofis* (Level 3 dan 4) dan <sup>(3)</sup> keaktifan pada aplikasi *coofis* (Level 3, 4 dan staf).

Optimalnya pencapaian ini karena operator *coofis* yang telah *memposting* pada halaman berita *coofis. Postingan* yang dilakukan yaitu minimal per triwulan sebanyak 8 berita yang mengandung 5W+1H.

Pada tahun 2024 pagu anggaran untuk menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Pangkalan PSDKP Batam sebesar Rp 30.095.000,- dan terealisasi Rp. 16.426.894,- atau 54,58%.

24) Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	TW I	TW II	Triwulan III 2024		
Kode	Uraian				Target	Capaian	%
IK24	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Batam	80	-	-	-	-	-

Target tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Batam adalah 80 dan menjadi target tahunan. Tingkat kepatuhan merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN di Pangkalan PSDKP Batam telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat usulan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) tahun 2020 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan IV tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) tahun 2017-2019 (bobot 20%);
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);

5. Penyusunan Laporan BMN (Semester dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%);

Pada tahun 2024 pagu tingkat kepatuhan pengelolaan BMN yaitu pelaksanaan pengelolaan BMN sebesar Rp. 50.304.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 47.963.026,- atau 95,35%.

25) Tingkat kepatuhan pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	TW I	TW II	Triwulan III 2024		
Kode	Uraian				Target	Capaian	%
IK25	Tingkat kepatuhan pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Batam	80	-	-	-	-	-

Target tingkat kepatuhan pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Batam adalah 80 dan menjadi target tahunan. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (bobot 20%);
2. Presentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (bobot 30%);
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/jasa (bobot 20%); dan
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (bobot 20%).

Pada tahun 2024 pagu tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa yaitu sebesar Rp. 360.000.000,- dan sudah terealisasi sebesar Rp. 259.193.000,- atau 72,00%.

26) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	TW I	TW II	Triwulan III 2024		
Kode	Uraian				Target	Capaian	%
IK26	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pangkalan PSDKP Batam	93,76	-	95,63	-	-	-

Target Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Pangkalan PSDKP Batam adalah 93,76 dan tercapai 95,63. Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran adalah proses evaluasi dan spending review terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada fitur Monev PA aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan. adapun indikatornya yaitu <sup>(1)</sup> Revisi DIPA, <sup>(2)</sup> Deviasi DIPA <sup>(3)</sup> Pengelolaan UP, <sup>(4)</sup> LPj Bendahara, <sup>(5)</sup> Data Kontrak, <sup>(6)</sup> Penyelesaian Tagihan, <sup>(7)</sup> Penyerapan Anggaran Tahun 2022 <sup>(8)</sup> Retur SP2D, <sup>(9)</sup> Perencanaan Kas, <sup>(10)</sup> Pengembalian SPM, <sup>(11)</sup> Dispensasi SPM dan <sup>(12)</sup> Pagu Minus dengan rincian sebagai berikut.

Adapun anggaran tahun 2024 untuk kinerja pelaksanaan anggaran Lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Batam yaitu pelaksanaan pengelolaan keuangan sebesar Rp. 206.529.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 201.434.329,- atau 97,53%.

27) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	TW I	TW II	Triwulan III 2024		
Kode	Uraian				Target	Capaian	%
IK27	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam	82	-	-	-	-	-

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam mendapat target 82 dan menjadi target tahunan. Indikator ini merupakan proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai ini diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap satuan kerja lingkup KKP kedalam aplikasi SMART Kemenkeu.

Pada tahun 2024 pagu anggaran untuk Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam yaitu pelaksanaan pengelolaan keuangan sebesar Rp. 206.529.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 201.434.329,- atau 97,53%.

### 3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk Penghitungan efisiensi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2022 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Hasil dari penghitungan efisiensi penggunaan anggaran menunjukkan penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja Pangkalan PSDKP Batam triwulan III tahun 2024 terbilang efisien.

Hal tersebut dikarenakan banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan seluruhnya dengan penyerapan anggaran yang efisien. Sebagai bentuk efisiensi dalam penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagian besar dilakukan pemeriksaan terhadap lebih dari

satu pelaku usaha dalam satu surat perintah tugas (SPT) sehingga capaian output dapat mencapai target dengan penggunaan anggaran yang efektif. Selain itu, dalam melaksanakan kegiatan pengawasan perikanan dan kelautan terutama pengawasan budidaya perikanan, kapal perikanan, pulau-pulau kecil dan Kawasan konservasi, pengawas perikanan serta polsus WP3K Pangkalan PSDKP Batam melakukan *onboard* pada kapal pengawas maupun speedboat pada saat unit-unit pengawasan tersebut melakukan operasi. Sehingga hal ini dapat mengefektifkan penggunaan anggaran terutama untuk transportasi perairan.

### 3.4 Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran Pangkalan PSDKP Batam TA. 2024 sebesar Rp. 59.765.587.000,- Anggaran tersebut terbagi menjadi dua program, yaitu program pengelolaan kelautan dan perikanan serta program dukungan manajemen. Pada tahun 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 32.960.362.367,- atau 55,15%. Rincian realisasi anggaran Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

**Tabel 3.** Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Batam Triwulan III Tahun 2024

No	Kode	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi	
				(Rp)	%
<b>Pengelolaan Kelautan dan Perikanan</b>					
1	2350	Pemantauan dan Operasi Armada	32.011.761.000	14.078.873.626	43,98
2	2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	1.094.000.000	664.981.439	60,78
3	2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	2.941.415.000	1.552.248.202	52,77
4	2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.455.790.000	835.427.096	57,39
<b>Dukungan Manajemen</b>					
5	2355	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP	22.262.621.000	15.828.832.004	71,10
<b>TOTAL</b>			<b>59.765.587.000</b>	<b>32.960.362.367</b>	<b>55,15</b>

## **BAB IV PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

1. Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Batam triwulan III Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan capaian kegiatan Pangkalan PSDKP Batam yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IKM). Terhadap capaian IKU dan IK tersebut dilakukan analisis serta evaluasi sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
2. Hasil capaian kinerja sasaran Pangkalan PSDKP Batam triwulan III tahun 2024 seluruhnya mencapai target yang diperjanjikan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) **107,68** dengan predikat **BAIK**. Hal tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan, sehingga sebagian besar kegiatan yang mencapai target dengan perencanaan kinerja dan anggaran yang baik serta pelaksanaan kegiatan dengan kemampuan sumber daya manusia yang memumpuni. Selain itu juga adanya koordinasi maupun pendampingan dari Eselon II lingkup Ditjen. PSDKP serta kerja sama dengan instansi terkait.

### **5.2 Rekomendasi**

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja Pangkalan PSDKP Batam triwulan III tahun 2024, sebagai upaya peningkatan capaian kinerja pada periode selanjutnya, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagai berikut:

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1.	<i>Rubberboat</i> yang berada di Satwas SDKP Bangka belum melaksanakan operasi patroli pengawasan SDKP	<i>Rubberboat</i> yang berada di Satwas SDKP Bangka melaksanakan operasi patroli pengawasan SDKP pada triwulan IV tahun 2024
2.	Realisasi anggaran pada kegiatan teknis masih belum optimal	Melakukan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan ketersediaan pagu anggaran

**LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PANGKALAN PSDKP BATAM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Turman Hardianto Maha  
Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Batam

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pung Nugroho Saksono  
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

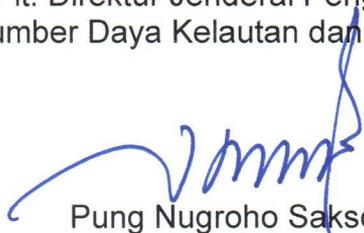
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Februari 2024

PIHAK KEDUA  
Plt. Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA  
Kepala Pangkalan Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam



Turman Hardianto Maha

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PANGKALAN PSDKP BATAM**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	81
SK2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (Indeks)	91
		3	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	91
		4	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
SK3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100
		6	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100
SK4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	7	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100
SK5	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan	8	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)	100
SK6	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	9	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100
SK7	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	10	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)	100
SK8	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	11	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	80
		12	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80
SK9	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	13	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93
SK10	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	14	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Indeks)	80
		15	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	75

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	
		16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	100
		17	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP (Nilai)	70
		18	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Indeks)	82
		19	Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	84
		20	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	21
		22	Inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Batam (Inovasi)	1
		23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	94
		24	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	80
		25	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	80
		26	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	93,76
		27	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	82

## Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	32.111.761.000
2.	Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	1.094.000.000
3.	Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	2.941.415.000
4.	Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.455.790.000
5.	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	22.262.621.000
<b>Total Anggaran Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2024</b>		<b>59.865.587.000</b>

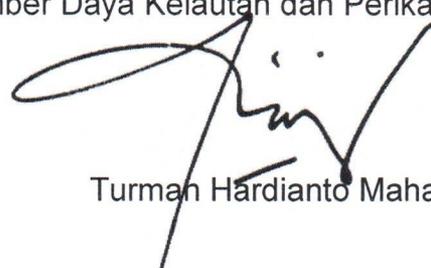
Jakarta, 15 Februari 2024

PIHAK KEDUA  
Plt. Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA  
Kepala Pangkalan Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam



Turman Hardianto Maha